

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Awal dari penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk lebih memahami studi Hubungan Internasional dengan mengambil suatu fenomena internasional khususnya di kawasan Asia Timur, karena di kawasan Asia Timur merupakan suatu daerah yang memiliki keunikan, persamaan kekerabatan serta budaya dan adat istiadat yang beragam.

Kawasan Asia Timur memiliki letak geografis yang cukup strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga mayoritas negara yang terhimpun di dalamnya mempunyai indeks pertumbuhan ekonomi yang lebih maju daripada negara asia lainnya, hal ini disebabkan karena faktor sejarah serta peradaban bangsa timur yang berkembang sangat pesat.

Dari disinilah penulis memfokuskan pada dua negara adidaya yaitu Jepang dan Cina. Kedua negara ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan asia maupun dalam lingkup global. Antara Cina dan Jepang tidak hanya memiliki letak geografis yang sangat berdekatan, namun dapat juga dikatakan sebagai negara serumpun, sehingga tidak dipungkiri kedua negara kerap melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai sektor.

Sektor – sektor tersebut antara lain yaitu, sektor politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan , dan budaya. Kerjasama yang kerap dilakukan kedua negara ini telah berlangsung selama berpuluh – puluh tahun. Kedua negara

menyadari dengan adanya kerjasama di berbagai bidang akan membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional masing – masing negara. Namun di dalam perjalanan kerjasama yang telah terjalin, terkadang menimbulkan beberapa persoalan dan masalah, karena perbedaan pendapat serta pandangan dari masing – masing negara.

Salah satu hal yang masih hangat diperbincangkan hingga sekarang adalah mengenai persengketaan pulau Senkaku atau Diaoyu yang diperebutkan kedua negara. Dimana kedua negara sama – sama mengklaim kepemilikan pulau tersebut, karena Kepulauan Senkaku atau Diaoyu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Perselisihan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu kembali mencuat berujung pada penangkapan awak kapal Cina oleh pemerintah Jepang, yang dianggap melanggar batas teritorial kedaulatan kedua belah negara. Berdasarkan penjelasan yang ada maka penulis mengambil judul “ **Hubungan Diplomatik antara Jepang dan Cina pasca Penangkapan Kapal Nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur** ”

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain :

1. Memberikan deskripsi/gambaran terhadap pasang surut hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina pasca penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur yang dipicu sengketa Kepulauan Senkaku.

2. Untuk menjelaskan pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari konflik dan konfrontasi antara kedua negara, yaitu Jepang dan Cina.
3. Untuk menerapkan teori – teori serta konsep Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan masalah tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era di mana terdapat proses atau kegiatan yang berpengaruh terhadap seluruh dunia dan melibatkan banyak orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama. Salah satu institusi yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan mengedepankan kepentingan adalah negara. Untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan tersebut, maka dibutuhkan adanya kerjasama antar negara satu dengan lainnya baik kerjasama bilateral, multilateral dan regional.¹

Salah satu contoh negara yang kerap melakukan hubungan kerjasama yaitu antara Jepang dan Cina. Jepang dan Cina merupakan dua negara yang berada dalam kawasan Asia Timur. Kedua negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan tiap tahunnya. Jepang sebagai negara maju, dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dunia dan kekuatan ekonomi utama baik di Asia maupun di dunia. Tidak hanya itu saja Jepang juga terkenal akan produksi dan temuan mutakhirnya di bidang permesinan, elektronik dan robotika.

Sama halnya dengan Cina, negara berjulukan Tirai Bambu ini merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia yang memiliki peranan yang penting dalam

¹ [http://budiscyan.multiply.com/journal/item/205/Menyikapi Era Globalisasi/](http://budiscyan.multiply.com/journal/item/205/Menyikapi_Era_Globalisasi/) diakses 17 Januari 2011

perekonomian global, khususnya di Asia. Pemerintah Cina juga memfokuskan diri dalam perdagangan sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, yang lebih berorientasi pada pasar global dan telah mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus. Salah satunya pada tahun 2010 Cina menjadi eksportir terbesar di dunia serta telah melebarkan sayapnya dalam perdagangan bebas yang sering disebut (*China Asean Free Trade Area*) CAFTA.²

Kedua negara kerap melakukan kerjasama ekonomi karena bagi Jepang, Cina memiliki pengaruh besar dalam perdagangan bebas dunia dan merupakan pasar potensial karena memiliki penduduk terbesar di dunia, sehingga menguntungkan Jepang dalam memasarkan produk – produknya. Sedangkan bagi Cina, Jepang telah membantu meningkatkan perekonomian Cina melalui bantuan resmi pembangunan dan investasi swasta, di mana Jepang sebagai investor Cina.

Kerjasama kedua negara tidak selamanya berjalan lancar. Sebelumnya hubungan diplomatik keduanya terputus akibat masa lalu perseteruan Cina dan Jepang dalam perang Nanjing. Namun seiring berjalannya waktu, baik Jepang dan Cina akhirnya memutuskan untuk memulihkan hubungan kedua negara pada 2 Oktober 1971. Kemudian pertemuan persahabatan tersebut dilanjutkan pada 29 September 1972 antara PM Jepang Kakuei Tanaka dan PM Cina Chou Enlai bersepakat untuk mengubur dan mengakhiri permusuhan melalui penandatanganan di atas sebuah komunike yang resmi menandai di bukanya hubungan diplomatik Tokyo – Beijing.³

² https://www.cia.gov/library/publications/the_world_factbook/geos/ch.html./diakses 30 Januari 2011

³ Purbadhi Syamsi, *Empat Belas Tahun Hubungan China – Jepang* dimuat dalam *Suara Kabar Suara Karya* pada Oktober 1986

Pasca pemulihan hubungan antara kedua negara, Cina dan Jepang berusaha meningkatkan hubungan keduanya melalui kerjasama di berbagai bidang. Dibuktikan setelah adanya komunike Shanghai, dalam kurun waktu 10 tahun banyak kerjasama yang dilakukan keduanya antara lain, di bidang ekonomi, Cina menjadi mitra dagang dan ekspor terbesar Jepang. Di bidang kebudayaan keduanya menandatangani pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan olahraga. Antara Jepang dan Cina juga menandatangani kerjasama iptek.⁴

Kerjasama yang telah dibina sejak lama ini memang berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan nasional masing – masing negara seperti halnya peningkatan di sektor ekonomi, perdagangan pendidikan bahkan kesehatan, namun dalam keakraban yang terjalin lewat kerjasama tersebut terkadang memunculkan luka lama antar kedua negara mengenai berbagai persoalan di masa lalu.

Contohnya dalam kurun waktu beberapa tahun terjadi beberapa peristiwa yang kembali mengganggu hubungan kedua negara, seperti halnya konflik sengketa kepulauan maritim, Jepang menyebutnya sebagai pulau Senkaku sedangkan Cina menyebutnya sebagai pulau Diaoyu. Antara Jepang dan Cina bersikeras mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya.

Kepulauan Senkaku atau Diaoyu ini berada di sekitar timur laut Taiwan, sebelah barat prefektur Okinawa dan juga terletak pada utara dari ujung barat daya Kepulauan Ryukyu di Laut Cina Timur. Jepang mengklaim Kepulauan Senkaku atas dasar Perjanjian San Fransisco tahun 1951, di mana AS

⁴ <http://indonesian.cri.cn/china.abc/chapter40t302.htm/> diakses 23 Desember 2010

menyerahkan perwalian Kepulauan Nansei Shoto ke Jepang pada tahun 1971. Senkaku adalah bagian dari Kepulauan Nansei Shoto.⁵

Sedangkan Cina menganggap Diaoyu sebagai wilayahnya sejak masa purbakala, yang berada di bawah pengaturan Taiwan namun klaim itu dibantah Jepang. Meskipun keduanya memiliki alasan yang mendasar untuk mengklaim kepemilikan pulau tersebut, namun belum ada penyelesaian yang terlihat bagi persengketaan tersebut.

Pulau Senkaku atau Diaoyu menjadi primadona dan diidamkan kedua negara karena pada tahun 1968 komisi ekonomi persyarikatan negara – negara untuk wilayah Asia Timur telah menyebutkan potensi cadangan minyak dan gas alam di perairan Senkaku. Potensi minyak dan gas di Laut Cina Timur tersebut mengakibatkan kedua negara memperebutkan Kepulauan tersebut.

Hubungan kedua negara dalam periode 1970 hingga 1990-an relatif membaik, salah satunya dapat terlihat dari kerjasama *Official Development Assistance* (ODA), yaitu kerjasama bantuan pembangunan resmi Jepang ke Cina. Namun sekitar tahun 2000-an hubungan kedua negara kembali menurun, akibat konflik sengketa Kepulauan Senkaku.

Pada Juli 2004 terjadi konfrontasi antara Cina dan Jepang. Hal tersebut terjadi karena Jepang mulai mengeksplorasi gas alam di sekitar pulau Senkaku yang dianggapnya sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Pengeksplorasian gas alam yang dilakukan Jepang merupakan langkah untuk melawan Cina. Tindakan tersebut menyulut kemarahan pihak Cina sebab pengeboran yang dilakukan hanya

⁵ <http://www.southchinasea.org/docs/Steven%20Wei%20Su-Tiaoyu-Senkaku%20Dispute.pdf>/ Diakses 16 Januari 2011

memberi keuntungan sendiri pada Jepang, dan Cina tidak dilibatkan dalam pengeksplorasian tersebut.

Perselisihan antara kedua negara dalam persengketaan pulau tersebut berjalan alot, namun pada tahun 2008 mulai menemukan titik terang. Dalam rangka memecahkan sengketa dengan Cina, Jepang mengajak Cina mengembangkan ladang-ladang gas di Laut Cina Timur. Pengembangan bersama direncanakan akan dilaksanakan di ladang Longjing atau Asunaro, yang merupakan empat ladang gas paling utara dekat dengan garis batas kedua negara.⁶

Meskipun hubungan kedua negara sempat mengalami penurunan, beberapa kerja sama khususnya kerjasama ekonomi masih dilakukan, namun tidak sekondusif sebelum terjadinya masalah tersebut. Kedua negara berusaha membangun kembali hubungan mereka, mengingat antara Jepang dan Cina saling bergantung satu sama lain dan memiliki kepentingan masing – masing dalam setiap kerjasama yang pernah dilakukan.

Kerjasama yang dilakukan antara lain pada Mei 2008 Cina dan Jepang juga menyepakati penanganan suatu proyek riset bersama dalam upaya memperbaiki kondisi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Kerjasama keduanya kembali bergulir pada Juni 2009 dimana antara Jepang dan Cina sepakat bertemu di Tokyo untuk melakukan pertemuan ekonomi. Agenda yang dibicarakan adalah

⁶ Hui Yu, "Joint development of mineral resources-An Asian solution", in: Ko Swan Sik et al., (eds), *Asian Yearbook of International Law* 1994, vol. 2, hal 87

langkah – langkah untuk mengatasi krisis ekonomi global, perdagangan dan investasi diantara kedua negara.⁷

Kerjasama yang signifikan juga sempat dilakukan kedua negara pada Mei 2010. Kedua negara bertemu di Seoul, dan melakukan kerjasama trilateral antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada tingkat Menteri Perdagangan. Kerjasama ini membantu memperdalam interaksi ekonomi yang saling menguntungkan antara tiga negara menuju terwujudnya integrasi ekonomi regional dalam jangka panjang.⁸

Meski hubungan kedua negara sudah cukup membaik namun terkadang terdapat guncangan yang melanda hubungan diplomatik antara negara Matahari Terbit dan negara Tirai Bambu tersebut. Persoalan – persoalan terdahulu yang belum tuntas menjadi pemicu ketegangan kedua belah pihak. Salah satunya yaitu terjadinya insiden penangkapan kapal nelayan Cina oleh Jepang di Laut Cina Timur pada 8 September 2010 .

Peristiwa ini dipicu konflik Kepulauan Senkaku yang masih dipersengketakan antara kedua belah pihak. Pulau ini diperebutkan karena di dalamnya menyimpan sumber gas dan minyak. Pada tanggal 8 september 2010 , kapten kapal nelayan Zhan Qiziong ditahan setelah kapalnya bertabrakan dengan dua kapal patroli pengawas pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku / Diaoyu yang disengketakan. Kepulauan tersebut terletak di wilayah Okinawa, daerah selatan Jepang. Penangkapan tersebut dilakukan oleh kapal patroli Jepang, karena

⁷<http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/internasional/jepang-china-capai-kesepakatan-kerja-sama-investasi-u0wtvrh.html/> diakses 12 Januari 2011

⁸http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=16709/ diakses 23 Januari 2011

pihak Jepang menganggap kapal nelayan Cina telah melanggar batas teritorial negaranya. Namun pihak Cina bersikeras bahwa apa yang dilakukan nelayan kapal ikan Cina tidak menyalahi aturan batas teritorial.⁹

Kedua negara meyakini bahwa penangkapan kapal nelayan Zhan terjadi di perairan yang mereka klaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Menurut pihak Cina dua kapal nelayannya hanya berada di dekat Perairan Senkaku, tidak memasuki batas teritorial perairan Jepang. Pihak Jepang mengklaim bahwa Cina telah melanggar batas teritorial dan akhirnya mengambil tindakan menangkap kapal nelayan Cina di Perairan yang di klaim kedua negara. Akhirnya Jepang menahan Zhan Qixiong dengan tuduhan melawan petugas pengawas pantai Jepang.

D. Pokok Permasalahan

Topik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini berdasarkan pemaparan diatas, yaitu : **“Bagaimana Pengaruh Insiden Penangkapan Kapal Nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur terhadap Hubungan Diplomatik antara Jepang dan Cina?”**

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka dibutuhkan konsep Diplomasi sebagai konsep utama. Menurut KM Panikkar dalam bukunya *“ The Principle*

⁹<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/7989126/Diplomatic-tensions-after-Japanese-arrest-Chinese-fisherman.html> / Diakses 05 Desember 2010

and Practice of Diplomacy ". **Diplomasi** dalam hubungannya dengan Politik Internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dengan negara lain.¹⁰

Sebuah negara menggunakan media diplomasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda – beda, dalam pencapaian kepentingan tersebut terkadang menimbulkan konflik antara dua negara. Media diplomasi dapat digunakan untuk meredakan konflik yang terjadi antara negara – negara yang sedang berselisih, yakni dengan menggunakan sarana lobbying dan bargaining. Namun apabila cara tersebut tidak berhasil maka dibutuhkan manajemen perubahan, melalui alternatif – alternatif lain yang tujuannya untuk mencapai kepentingan nasional.

Hal terpenting dalam hubungan suatu negara dengan negara lain tergantung pada tatanan dunia yang selalu berubah. Oleh karena itu sarana diplomasi yang digunakan negara juga ikut mengalami transformasi untuk mewujudkan kepentingan nasional. Berdasarkan kondisi nyata dan globalisasi, pelaksanaan diplomasi disesuaikan dengan tuntutan internasional merupakan keharusan sebagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan baik perubahan politik dan isu – isu internasional. Dengan adanya kepiawaian seorang diplomat dalam mengelola dan memahami perubahan situasi global secara kekinian, maka akan memudahkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional negaranya.¹¹

¹⁰ S.L. Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3.

¹¹ S.L. Roy, *op.cit*, hlm 5

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa media diplomasi dapat mengalami perubahan yang disesuaikan oleh kebutuhan suatu negara, yakni dari diplomasi dengan cara damai dapat berubah menggunakan kekerasan, seperti halnya ancaman dan tindakan tegas untuk menekan negara lain. Adanya perubahan sarana diplomasi dikarenakan antara dua negara yang berselisih tidak memiliki *trust* (kepercayaan), *respect* (rasa saling menghormati) dan keselarasan, sehingga sarana diplomasi melalui alternatif tindakan tegas dan ancaman dapat dipakai untuk membuat kesepakatan bersama.

Salah satu bentuk dari penggunaan tindakan tegas dan ancaman yaitu dengan melakukan penangguhan hubungan diplomatik antara negara satu dengan negara lain. Itu dilakukan karena dua negara bersikeras untuk mempertahankan argumennya. Penangguhan hubungan diplomatik biasanya terjadi akibat penolakan untuk memberikan pengakuan yang sah terhadap wilayah suatu negara.¹²

Apabila terjadi penangguhan hubungan diplomatik, komunikasi diantara dua negara yang berkonflik tetap perlu dipertahankan, karena merupakan kebutuhan untuk meminimalisir akibat dari menurunnya hubungan diplomatik atau jalur untuk memulihkan hubungan dua negara agar kembali normal.¹³

Diplomasi merupakan seni menuntut kreatifitas untuk bisa memainkan instrumen – instrumen yang dimiliki negara. Instrumen – instrumen negara melalui jalan diplomasi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan

¹² Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal 86

¹³ Sukawarsini Djelantik, *op.cit*, hal 87

syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan – tujuan pemerintah saling bertentangan.

Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat – diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mengirimkan konsesi, atau mengirimkan ancaman.¹⁴

Berdasarkan kondisi nyata dan globalisasi, pelaksanaan diplomasi sesuai dengan tuntutan internasional merupakan keharusan sebagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan baik perubahan politik dan isu – isu internasional. Dengan adanya kepiawaian seorang diplomat dalam mengelola dan memahami situasi global secara kekinian, maka akan memudahkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional negaranya.

Menurut Jack Plano dan Roy Olton kepentingan nasional adalah :

“National interest is the fundamental and ultimate determine that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the states’s most vital needs. The includes self preservation, indepedence, teritorial integrity, military security and economic well being”.

(Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas dari berbagai elemen yang merupakan keinginan sangat vital yang termasuk dalam elemen tersebut adalah

¹⁴ Sukawarsini Djelantik, *op.cit* ,hal 4.

mempertahankan kemerdekaan, integrasi wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi).¹⁵

Diantara elemen – elemen tersebut diatas, kesejahteraan ekonomi adalah salah satu kebutuhan vital bagi sebuah negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kesejahteraan ekonomi suatu negara berarti kesejahteraan bagi rakyat.

Terkadang adanya keselarasan kepentingan diantara dua negara, dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Ini terjadi karena dua negara memiliki kepentingan yang sama, dimana keduanya bersikeras dan berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepentingan mereka yang bertujuan memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Secara sederhana, kesejahteraan ekonomi mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran, keinginan atau hasrat suatu negara untuk mencapai tujuan – tujuan nasionalnya dengan menggunakan cara – cara tertentu. Politik luar negeri digunakan sebagai pertanggungjawaban kepentingan suatu negara terhadap negara lain.¹⁶

Menurut Gibson dalam bukunya, *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikan politik luar negeri, sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan tujuan pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri juga ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa.

¹⁵ Jack C.Plano dan Roy Olton,*The Internasional Relations Dictionary*, Third Edition Western Michigan University (ABL-Clio, California 1980), hlm 9

¹⁶ S.L. Roy, *opcit*, hlm 3

Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Meskipun tujuan politik luar negeri setiap negara berbeda – beda , tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal, misalnya perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, keamanan, ekonomi, bahkan integritas wilayah.

Dilihat dari hubungan Jepang dan Cina , kasus penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur dipicu oleh sengketa Kepulauan Senkaku. Dimana kedua negara sama – sama mengklaim kedaulatan kepulauan tersebut. Sengketa Kepulauan Senkaku atau sering juga disebut Kepulauan Diaoyu ini kerap mengalami dinamika, hal ini disebabkan karena adanya perubahan keadaan suhu politik kedua negara. Namun terjadinya penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 cenderung memperburuk hubungan kedua negara sehingga mengakibatkan meningkatnya klaim kedua negara untuk menguasai Kepulauan tersebut.

Media diplomasi merupakan alternatif untuk menetralsir konflik persengketaan pulau antar kedua negara. Akan tetapi apabila diplomasi secara damai telah dilakukan namun tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka dibutuhkan perubahan sarana diplomasi lain yakni dengan melakukan tindakan

dan ancaman ancaman untuk memperoleh kesepakatan bersama. Penangkapan yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap kapal nelayan Cina tahun 2010 di perairan Laut Cina Timur mengakibatkan kemarahan bagi pemerintah Cina.

Cina telah berupaya melakukan diplomasi damai dengan menugaskan Duta Besar Cina untuk menyampaikan pembebasan terhadap kapal nelayan Cina yang ditangkap Jepang. Namun upaya yang dilakukan Cina tidak diindahkan Jepang dan tetap memperpanjang penahanan kapal nelayan tersebut.

Jalan diplomasi damai telah ditempuh Cina untuk menghasilkan kesepakatan bersama dengan Jepang namun cara tersebut gagal, sehingga Cina merubah sarana diplomasinya melalui ancaman dan tindakan tegas seperti menanggukkan beberapa kerjasama yang sempat disepakati yang tujuannya untuk mencapai kepentingan negara. Meskipun kedua negara berselisih namun keduanya berusaha menjalin komunikasi sebagai akibat dari menurunnya hubungan antara Jepang dan Cina atau sebagai alternatif untuk memperbaiki hubungan keduanya.

Konflik Kepulauan Senkaku atau Diaoyu telah berlangsung lama dan berlarut – larut, hingga saat ini kedua negara tetap bersikeras mengakui bahwa Kepulauan tersebut merupakan wilayah kedaulatan mereka. Hal yang menyebabkan masing - masing negara bersikeras mempertahankan Kepulauan Senkaku karena pulau tersebut memiliki potensi yang besar di masa depan dengan adanya pasokan minyak, gas dan ikan.

Dalam diplomasi dibutuhkan perwakilan negara yang memiliki kreatifitas untuk mengedepankan kepentingan negaranya. Keterampilan tersebut harus

disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi politik saat itu sehingga kesepakatan antar kedua negara dapat terwujud. Apabila kesepakatan antara Jepang dan Cina terwujud maka akan menguntungkan kedua negara dalam pencapaian kepentingan nasional.

Kepentingan nasional melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional, dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan terencana yang ditujukan oleh suatu negara. Seperti dijelaskan pada pemaparan diatas, sektor ekonomi merupakan kepentingan yang sangat mendasar bagi Jepang dan Cina. Adanya keselarasan kepentingan antara keduanya mengakibatkan perebutan kepemilikan pulau Senkaku /Diaoyu. Itu terjadi karena adanya potensi – potensi ekonomi yang akan dihasilkan Kepulauan Senkaku apabila pulau tersebut dikuasai oleh salah satu negara.

Adanya politik luar negeri pada masing – masing negara adalah upaya dan senjata untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan tersebut mengacu pada perekonomian, dimana adanya kedaulatan wilayah, khususnya kepemilikan pulau Senkaku / Diaoyu nantinya akan menghasilkan keuntungan ekonomi tersendiri bagi masing – masing negara, karena kedua negara menyadari bahwa pulau tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar dan melimpah.

Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan pulau tersebut nantinya akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Melihat keuntungan – keuntungan yang menjanjikan dari potensi Kepulauan

Senkaku / Diaoyu, antara Jepang dan Cina bersikeras dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat pengakuan atas kepemilikan kepulauan tersebut.

Terjadinya insiden penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur membuktikan bahwa antara Jepang dan Cina bersikeras untuk mengakui Kepulauan Senkaku sebagai kedaulatan mereka. Peristiwa penangkapan yang terjadi menggambarkan bahwa Kepulauan Senkaku atau Diaoyu sangat penting bagi Jepang dan Cina, karena kepemilikan Kepulauan tersebut merupakan salah satu dasar dari kepentingan nasional kedua negara. Dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari insiden tersebut terhadap hubungan diplomatik Jepang dan Cina akan dideskripsikan pada bab – bab selanjutnya.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam usaha untuk menghindari penulisan ilmiah yang meluas, maka salah satu cara yang digunakan yaitu dengan melakukan penyempitan masalah, yang diaplikasikan melalui jangkauan penelitian. Untuk itu penulisan ilmiah ini memiliki mempunyai batasan penelitian dari tahun 2004 – 2010 dimana dalam kurun waktu tersebut, penangkapan nelayan kapal Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina timur yang dipicu sengketa Kepulauan Senkaku benar – benar memuncak dan menjadi perhatian masyarakat internasional.

G. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah ini menggunakan studi pustaka, sehingga data yang diperoleh dan diolah adalah data – data yang bersifat sekunder

yang didapat dari literatur , buku, surat kabar, jurnal, majalah, dan sumber – sumber lain yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ilmiah ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Berisikan pendahuluan, dimana tertulis rangkuman singkat tentang permasalahan yang akan diteliti. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, yang nantinya akan digunakan sebagai *frame of reference* bagi penulis untuk menyusun bab selanjutnya.

Bab II Berisikan tentang dinamika hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina sebelum terjadinya insiden penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur.

Bab III Merupakan pembahasan mengenai insiden penangkapan kapal nelayan Cina tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur yang dipicu sengketa Kepulauan Senkaku. Disini menggambarkan posisi Kepulauan Senkaku dan kepentingan Jepang dan Cina terhadap Kepulauan tersebut.

Bab IV Merupakan pembahasan mengenai pengaruh insiden penangkapan kapal nelayan Cina pada tahun 2010 di Perairan Laut Cina Timur terhadap hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.

Bab V Merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dari permasalahan tersebut.